

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Konflik Kepentingan Dalam Proses Pelibatan Atlet Sepakbola Diaspora Indonesia Periode 2019-2023” ini adalah telah ditemukannya konflik kepentingan para pemangku kekuasaan khususnya ranah parlemen (DPR-RI) yang beberapa perannya di inisiasi oleh anggota nya sendiri, khususnya komisi 10 DPR-RI. Awal mula semua konflik kepentingan dimulai dari staff pelatih Tim Nasional sepakbola Indonesia mengajukan beberapa nama pemain diaspora atau keturunan yang berkarir diluar negeri kepada pihak federasi (PSSI). Oleh karena itu federasi yang ingin memajukan sepakbola nasionalnya menyetujui rencana dari staff kepelatihan tersebut untuk menaturalisasi beberapa pemain diaspora atau keturunan yang berkarir diluar negeri agar bisa membela Tim Nasional sepakbola Indonesia di event-event Internasional nantinya.

Namun pada saat proses naturalisasi berlangsung, yang dimana proses ini melibatkan beberapa instansi di dalam negeri salah satunya DPR-RI, yang dimana mereka berperan untuk menyetujui proses pemberian kewarganegaraan Indonesia terdapat beberapa pendapat atau statement yang menolak untuk memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada beberapa pemain yang diajukan oleh federasi agar bisa membela Tim Nasional sepakbola Indonesia. Syaiful Huda selaku ketua Komisi 10 DPR-RI yang dimana dalam komisinya tersebut membidangi beberapa aspek seperti keolahragaan dan pendidikan menolak untuk menyetujui pemberian kewarganegaraan pemain yang akan di naturalisasi oleh pihak federasi. Beliau menjelaskan beberapa faktor yang dimana pada akhirnya dia mengeluarkan pendapat atau statement tidak menyetujui tersebut.

Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah pihak federasi tidak memiliki roadmap atau blue print yang jelas untuk kedepannya sehingga proses naturalisasi ini mau sampai kapan dilaksanakannya dan juga pihak federasi tidak melaksanakan pembinaan di level bawah (usia dini) dengan baik sehingga kesannya hanya mengambil jalan pintas untuk mengejar prestasi yang bahkan sampai hari ini juga belum menghasilkan prestasi (gelar

juara) apapun di level senior. Tidak hanya Syaiful Huda yang memberikan pendapatnya terkait naturalisasi ini namun beberapa anggota dari Komisi 10 DPR-RI seperti Putra Nababan dan Mohammad Haerul Amri juga ikut menyampaikan pendapatnya terkait langkah federasi yang ingin menaturalisasi pemain tersebut.

Putra Nababan mengatakan dalam sidang persetujuan pemberian kewarganegaraan tersebut kalau bisa komposisi pemain Tim Nasional sepakbola Indonesia yang berada dilapangan 60% pemain nasional (lokal), jangan dibalik karena ini soal kepercayaan kita dan ketika memasuki ranah DPR-RI ini juga berbicara tentang politik keolahragaan bukan murni olahraga. Mohammad Haerul Amri juga menyampaikan statement nya lebih baik kemenangan mengambil pemain dari turnamen antar kampung (tarkam) yang dimana melibatkan betul-betul orang Indonesia dan bayarannya murah daripada mengambil pemain naturalisasi yang mengaku sebagai keturunan Indonesia sementara bayarannya mahal dan intoleran dengan kualitasnya.

Berbagai statement dari pemangku kepentingan di ranah parlemen memiliki kepentingannya masing-masing, diantara lain untuk memajukan bakat pemain lokal dan pengembangan pemain di Indonesia. Namun hal tersebut sulit tercapai, karena butuh keterlibatan berbagai pihak di Indonesia mulai dari federasi, pihak swasta bahkan pemerintah. Menurut bung Towel (pengamat sepakbola), memajukan sepakbola Indonesia tidak bisa dilakukan oleh pihak federasi (PSSI) saja, namun harus melibatkan peran instansi lainnya. Tugas federasi (PSSI) untuk saat ini hanya mengejar kualitas pelatih lokal untuk mendapatkan lisensi AFC dan UEFA agar bisa memberikan kurikulum pengajaran kepada sekolah-sekolah sepakbola di Indonesia dengan baik. Lalu selanjutnya dibutuhkan peran dari pihak swasta yang berani menginvestasikan bisnisnya melalui sepakbola dengan membangun sekolah sepakbola berskala nasional atau internasional dan yang terakhir dibutuhkannya peran pemerintah dalam membangun infrastruktur untuk menunjang bakat-bakat pemain pembinaan tersebut.

Memang tugas yang berat namun hal tersebut bisa saja terjadi apabila semua pihak memiliki semangat yang sama untuk memajukan sepakbola di dalam negeri. Namun sebenarnya dari semua permasalahan diatas tersebut proses naturalisasi ini sudah di sahkan secara Undang-Undang dan juga peraturan dari federasi sepakbola Internasional

(FIFA). Dari dalam negeri sendiri kebijakan terkait naturalisasi ini sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di dalam kebijakan tersebut disampaikan bahwasanya naturalisasi adalah tata cara bagi orang asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan, verifikasi data, pemeriksaan administrasi dan legalitas, hingga pengambilan sumpah sebagai WNI.

Lalu ada juga kebijakan yang langsung dikeluarkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2017 yang dimana didalamnya membahas tentang fasilitas bagi masyarakat di luar negeri. Kedua kebijakan ini menjadi landasan hukum dari proyek naturalisasi yang dijalankan oleh federasi (PSSI) saat ini. Terlebih dari itu proyek naturalisasi yang dijalankan oleh federasi (PSSI) saat ini juga hanya melibatkan pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir diluar negeri, berbeda seperti proyek naturalisasi di zaman dulu yang dimana hanya untuk menunjang kebutuhan club peserta Liga Indonesia untuk mengisi slot pemain asing.

Di dalam setiap kebijakan pastinya menghasilkan keuntungan dan kerugian, dalam konteks ini kebijakan tersebut bisa dikatakan dapat menguntungkan posisi Indonesia, di karenakan dengan adanya fasilitas kebijakan tersebut maka pihak federasi bisa membujuk pulang pemain diaspora yang berkarir di luar negeri untuk pulang membela tanah kelahirannya di event-event Internasional. Hal ini juga yang bisa membuat komposisi Tim Nasional sepakbola Indonesia semakin kuat dikarenakan datangnya pemain-pemain yang sudah mendapat pendidikan sepakbola di luar negeri khususnya negara maju dan berkarir diluar negeri sehingga lebih kompetitif. Namun bisa saja menjadi kerugian kita apabila pihak federasi tidak memerhatikan pengelolaan dan pengembangan sepakbolanya di dalam negeri serta tidak memiliki roadmap atau blue print yang jelas sebagai tonggak utama federasi itu sendiri.